

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemerintah meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakatnya dan mewujudkan tujuan nasional melalui upaya yang yang disebut sebagai pembangunan nasional. Visi pembangunan Indonesia tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan misi atau disebut Nawacita Kedua, salah satu misinya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Strategi presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dengan menetapkan lima arahan utama, salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” adalah salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN tersebut.

Menurut Maths & Jackson (2006), sumber daya manusia didefinisikan sebagai sistem formal yang dirancang dalam organisasi guna memastikan bahwa pemanfaatan kemampuan individu dengan efisien dan efektif untuk meraih tujuan organisasi (dalam Siregar, 2017: 378). Menurut data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia per Juni 2022 jumlahnya adalah 275,36 juta jiwa. Terdapat 190,83 juta jiwa dengan usia produktif (15-64 tahun) atau 69,3 % dari jumlah penduduk Penduduk Indonesia. Artinya, Indonesia sekarang memasuki masa bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding penduduk usia non produktif.

Diperkiraan pada tahun 2030 mendatang menjadi puncak dari bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi menjadi peluang bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan nasional apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Keberhasilan bonus demografi akan diperoleh apabila Indonesia memiliki SDM yang kualitasnya bagus dan memiliki daya saing.

Penduduk yang menjadi tulang punggung pembangunan adalah pemuda sehingga pemuda menjadi sosok penting dalam pembangunan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/2009 tentang Kepemudaaan, yang dimaksud pemuda adalah penduduk yang berusia 16-30 tahun. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia kategori pemuda sebanyak 68,82 juta jiwa penduduk pada Maret 2022 atau sebesar 24% dari total penduduk (katadata.co.id, 2023). Sebagai agen pemabngunan, pemuda mempunyai posisi dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang. Peningkatan kompetensi pemuda harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak terutama pemerintah apalagi dihadapkan dengan adanya bonus demografi di masa mendatang.

SDM pemuda yang berkualitas akan berpotensi menunjang keberhasilan pembangunan nasional, tetapi SDM pemuda yang tidak berkualitas justru akan menghambat proses pembangunan nasional karena menimbulkan masalah seperti tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran di kategori pemuda (15-29 tahun) sebanyak 4,98 juta jiwa pada Februari 2022 atau 59% dari 8,4 juta pengangguran di Indonesia (katadata.co.id, 2022). Menurut

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, agar bonus demografi dapat dimanfaatkan, salah satu caranya adalah dengan keberhasilan pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda dapat menjadi penentu keberlanjutan pembangunan ekonomi bangsa dengan cara mendorong semangat kewirausahaan dikalangan pemuda untuk menghasilkan pengusaha muda sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru (kemenkopmk.go.id, 2020).

Sama halnya yang dikatakan oleh Zainudin Amali, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI bahwa bonus demografi dapat dihadapi salah satunya adalah dengan mendorong pemuda untuk bergerak di bidang kewirausahaan (kemenpora.go.id, 2020). Pada tahun 2019, persentase wirausahawan di Indonesia dibanding dengan negara serumpun lainnya masih terhitung rendah, yaitu hanya 3,4% dari total penduduk Indonesia. Dengan begitu, pemerintah harus membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional. Diharapkan jumlah wirausahawan Indonesia minimal mencapai 4% agar Indonesia menjadi negara yang berdaya saing.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024, bahwa kewirausahaan adalah kegiatan membuat atau membangun usaha yang inovatif serta berkepanjangan. Sementara wirausaha adalah setiap individu yang mempunyai jiwa kewirausahaan serta melakukannya. Wirausahawan merupakan seorang yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, mereka mandiri, dan memenuhi kebutuhan mereka menggunakan kreativitas berusaha yang dimiliki (Suryadi, 2019: 56). Dalam peraturan presiden tersebut juga dijelaskan bahwa wirausaha pemuda merupakan

wirausaha yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda sangat sesuai menjadi wirausaha karena mereka masih memiliki tenaga dan waktu yang cukup panjang, mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif. Dengan pengembangan wirausaha pemuda diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pemuda dan melahirkan wirausaha pemuda yang dapat membuka lapangan kerja baru serta mengurangi angka pengangguran.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI melakukan upaya dalam menumbuhkan minat kewirausahaan pemuda di daerah dengan melaksanakan program nasional penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda pada tujuh daerah kabupaten/kota sebagai daerah *pilot project* program tersebut. Tujuh daerah *pilot project* program tersebut antara lain Kabupaten Tegal, Kabupaten Wajo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Mandalika, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Nunukan, dan Magelang. Dari tujuh daerah kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Tegal dipilih menjadi daerah pertama untuk dijadikan sebagai *pilot project* program tersebut. Hal tersebut karena Kemenpora RI menilai bahwa Kabupaten Tegal merupakan daerah paling siap diantara daerah lain untuk pengembangan semangat wirausaha muda mulai dari segi kebijakan pemerintah daerah dan anggaran yang disediakan (jateng.tribunnews.com, 2019). Pada tahun 2018, Kemenpora RI berkolaborasi dengan Pemkab Tegal dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu agar pemerintah pusat dan daerah mempunyai persepsi yang sama terkait pengembangan kewirausahaan pemuda agar melaksanakan program tersebut dapat berjalan lancar (tigapilarnews.com, 2018).

Pada tahun 2019, Kabupaten Tegal merancang dan meluncurkan sebuah inovasi dalam melaksanakan program penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda tersebut, yaitu Program Wirausaha Pemuda (WP) Kabupaten Tegal dengan slogan “Tegal *Golét* Bos Muda”¹. Program penumbuhan wirausaha muda merupakan salah satu Program Unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024 (RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024). Program WP ini mendukung misi ke (4) dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, yaitu tentang peningkatan kualitas SDM. Tujuan misi ini adalah mewujudkan SDM yang berkualitas, dengan salah satu sasarnya adalah meningkatkan produktivitas pemuda, dengan strateginya adalah peningkatan kewirausahaan pemuda.

Program Wirausaha Pemuda (WP) merupakan inovasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Tegal sebagai upaya untuk memberikan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Tegal. Pemkab Tegal membuat inovasi Program Wirausaha Pemuda (WP) juga karena salah satu isunya adalah angka pengangguran Kabupaten Tegal yang tinggi. Oleh karena itu, kultur wirausaha pada kalangan pemuda harus ditingkatkan agar nantinya mereka juga membuka lapangan kerja baru dan diharapkan berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran Kabupaten Tegal.

Inovasi didefinisikan oleh Rogers (2003) sebagai suatu gagasan, objek atau praktik yang dianggap baru oleh orang atau unit adopsi lainnya (dalam Thahir, 2019: 180). Inovasi dapat berasal dari inisiatif kepala daerah, perangkat

¹ Tegal *Golét* Bos Muda artinya Tegal mencari bos muda. *Golét* merupakan bahasa Tegal yang berarti mencari.

daerah, ASN, anggota DPRD, serta masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38/2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi di sektor publik pada tahun 2014-2016 didominasi oleh pemerintah daerah (Pratama, 2020: 25). Posisi pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat daripada Pemerintah Pusat sehingga diharapkan inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat kian responsif dan solutif terhadap masalah yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Program WP Kabupaten Tegal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam urusan pembangunan kepemudaan yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 6/2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Program ini untuk pemuda usia 19 tahun sampai 28 tahun, hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memiliki usia 16 tahun sampai 30 tahun. Usia 19-28 tahun dipilih sebagai peserta program karena usia 16-18 tahun masih dalam usia sekolah yang kemungkinan akan mengganggu sekolahnya. Kemudian ditentukannya usia 28 tahun karena Program WP Kabupaten Tegal mempunyai bimbingan berkelanjutan minimal dua tahun sehingga jika usia 30 tahun tentu melebihi usia pemuda yang ditetapkan (disporapar.tegalkab.go.id, 2022).

Pada tahun 2022, Program Wirausaha Pemuda yang semula dipegang oleh Bappeda Litbang Kabupaten Tegal diestafetkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Tegal karena program tersebut berkaitan dengan pemuda. Pelaksana atau Tim Kerja Program WP ini tertuang dalam surat

keputusan bupati Tegal tentang pembentukan tim pengarah dan tim kerja kolaborasi Program WP Kabupaten Tegal. Tim pada Program WP terdiri atas Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda.

Inovasi Program WP Kabupaten Tegal merupakan program yang baru dan belum ada program seperti ini sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Porapar Kab. Tegal:

“Program WP ini belum ada ya sebelumnya. Jadi program yang benar-bener baru, ya inovasi bener-bener program baru. Karena sebelumnya belum ada program yang seperti ini.” (Wawancara Kamis, 15 Maret 2024).

Inovasi Program WP Kab. Tegal diluncurkan tahun 2019, sebelumnya di Kabupaten Tegal sudah ada program tentang pelatihan kewirausahaan tetapi tidak terdesain sistematis dan belum fokus kepada pemuda seperti program saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepemudaan Disporapar Kab. Tegal:

“Sebelumnya itu kewirausahaan sudah ada tapi mungkin tidak terdesain sistematis sebagus saat ini dan belum fokus kepada usia pemuda. Jadi sebelum tahun 2019 itu ya kewirausahaan sudah ada tapi itu masih umum tidak fokus pada pemuda ya kan dan tidak terdesain sistematis sedemikian bagusnya seperti saat kali ini. Contohnya kalau sebelum 2019 itu misalnya kita kan ada tuh kegiatan, masih sporadis masih belum terorganisir, misalnya Dinas Perindustrian menyelenggarakan pelatihan pembuatan kue atau Dinas perikanan pelatihan budidaya lele itu sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi kan hanya berupa pelatihan saja, pelatihan yang hanya selama 3 hari atau maksimal 5 hari sudah selesai, setelah selesai dikasih uang saku atau mungkin dikasih alat. Alat juga hanya sekedarnya sudah selesai. Paling hanya monitoring ala kadarnya lah ya tapi tidak sampai lama gitu loh...” (Wawancara Rabu, 25 Oktober 2023).

Pada Dinas Porapar sendiri sebelumnya sudah ada pelatihan kewirausahaan pemuda setiap tahun dengan tema pelatihan yang berbeda tiap

tahun, tetapi tidak sekomplit inovasi Program WP saat ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Seksi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan Disporapar Kab. Tegal:

“...kalau bicara bagian dari kewirausahaan, seperti pelatihan itu dulu ada semenjak saya 2010 terakhir 2019 kita ada kegiatan tentang pelatihan kewirausahaan pemuda setiap tahunnya dan temanya ganti-ganti, misal sablon atau bengkel, itu selama 2 hari, habis itu sudah, tiada ada kontrol atau pengawasan. Tapi karena ada covid-19 itu hilang dan diganti oleh program wirausaha pemuda yang sangat komplit...” (Wawancara Selasa, 7 November 2023).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya inovasi Program WP, terdapat kegiatan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tegal, tetapi belum difokuskan untuk pemuda, belum terdesain dan terstruktur secara sistematis seperti saat ini, dan masih terpisah-pisah pelaksanaannya di beberapa dinas, belum terorganisir menjadi satu, serta belum ada pemberian insentif atau modal usaha bagi peserta pelatihan. Sedangkan pada Dinas Porapar sebelum adanya inovasi Program WP ini, terdapat kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilakukan setiap tahun selama 2 hari dengan tema pelatihan yang berganti tiap tahunnya. Setelah pelatihan dilakukan, selanjutnya tidak ada kontrol atau pengawasan kepada para peserta pelatihan tersebut.

Setelah adanya inovasi Program WP Kabupaten Tegal, pelatihan kewirausahaan di Dinas Porapar diganti dengan Program WP yang difokuskan bagi pemuda dan sudah terstruktur atau terdesain secara sistematis. Sebagaimana yang terdapat pada PPT untuk Sosialisasi Program WP dari Disporapar Kab. Tegal yang menjelaskan bahwa letak inovasi pada Program WP adalah untuk menjalankan program, terdapat tim pengarah yang terdiri dari berbagai kepala OPD

yang berkaitan dengan kegiatan wirausaha pemuda serta tim kerja kolaborasi penumbuhan dan pengembangan yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat; berbeda dengan pelatihan kewirausahaan lainnya yang hanya 2-3 hari saja, Program WP tiap *chapter*-nya dijalankan selama 2 tahun, tahun pertama untuk penumbuhan kewirausahaan dan tahun kedua untuk pengembangan kewirausahaan; pemberian insentif atau modal usaha bagi peserta program yang terpilih sebagai top 28 besar dan 5 bos muda.

Inovasi merujuk pada hal-hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga diperlukan tata kelola inovasi yang baik. Hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut *United Nations* (2015) terkait *Innovation Public Service Delivery: Learning from Best Practice*, bagian sentra dalam inovasi penyediaan layanan publik adalah tata kelola (dalam Andhika, 2018: 209). Alberti & Bertucci, 2007 (dalam Andhika, 2018: 216) mengungkapkan bahwa keberhasilan inovasi dilihat dari tata kelola inovasi. Yang paling utama dalam pengadaan pelayanan publik yang inovatif memerlukan penguatan tata kelola dan kapasitas sektor publik adalah terkait aktor kebijakan, analisis kelembagaan, dan masyarakat dalam sistem tata kelola (Andhika, 2018).

Pada penelitian terdahulu dari Suranto et al. (2023), hasil penelitiannya adalah inovasi GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) pada DPMPSTSP Kab. Bantul untuk fasilitasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM terpilih menjadi inovasi terbaik dalam kompetisi inovasi Bantul tahun 2023 karena tata kelola inovasi layanan GAMPIL secara kelembagaan sudah baik,

seperti adanya regulasi yang benar, inovasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh pelaksana, sebagian besar inovasi didukung oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku. Secara aktor kebijakan, aktor internal sebagai *leading sector* inovasi adalah DPMPTSP Kab. Bantul, aktor eksternal sebagai pendukung implelementasi inovasi adalah Dinas Koperasi UKM dan Industri, Kemenag, kecamatan dan kelurahan. Pada aspek masyarakat, pengetahuan tentang program ini masih kurang, sebagian besar belum mengenal aplikasi berbasis TI, dan partisipasi masyarakat pada inovasi cukup baik. Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Eprilianto et al. (2023). Hasil penelitiannya adalah keberhasilan inovasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro karena pada aspek kepemimpinan bahwa Kepala Dinas PMPTSP menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan transformatif, pada aspek manajemen telah mengembangkan layanan berbasis teknologi, adanya manajemen risiko, memiliki SDM yang berpengalaman dan kompeten, dan layanan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi.

Kegiatan dari inovasi Program WP berbentuk kompetisi penstrategian berwirausaha dan pengembangan wirausaha. Tahapan Program WP diawali dengan tahap penumbuhan kewirausahaan pemuda, yaitu dimulai dari pendaftaran calon peserta Wirausaha Pemuda yang berusia 19-28 tahun. Pendaftaran dilakukan melalui *website* dengan mencantumkan ide/gagasan bisnis yang akan dijalankan. Kemudian akan diseleksi menjadi 100 besar yang selanjutnya akan mendapat fasilitasi pelatihan dan pembekalan penyusunan rencana bisnis, lalu dinilai dan diseleksi menjadi 28 besar (setda.tegalkab.go.id, 2022). Bagi top 28

wirausahawan pemuda akan mendapatkan dana insentif pengembangan usaha sebesar Rp 15 juta. Tahapan selanjutnya adalah tahap pengembangan kewirausahaan pemuda, yaitu peserta 100 besar termasuk top 28 juga akan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya pada tahun berikutnya. Kemudian akan diseleksi lagi menjadi 5 Bos Muda Kabupaten Tegal yang akan mendapatkan insentif lagi sebesar Rp 15 juta.

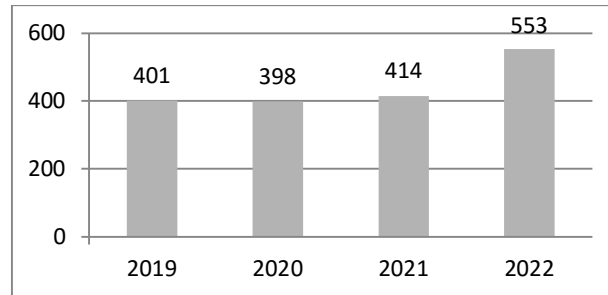
Menurut penelitian Fauziah et al. (2022), Program Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal cukup efektif dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal pada masa pandemi Covid-19 menurut pengukuran efektivitas dari Sutrisno, Sejalan dengan penelitian Indrayanti (2021) bahwa Program WP cukup efektif sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal dan implementasinya cukup baik sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menumbuhkan wirausahawan baru di Kabupaten Tegal².

Sejak tahun 2019 hingga 2022, Pemerintah Kabupaten Tegal sudah melakukan Program WP hingga Putaran Keempat (*Chapter 4*) dan pada 2023 sudah akan memasuki Putaran Kelima (*Chapter 5*). Cukup banyak pemuda Kabupaten Tegal yang mendaftarkan diri mengikuti Program Wiausaha Pemuda.

² Laporan Hasil Kelitbangan dan Penerapan Sistem Iptekin yang berjudul “Implementasi dan Efektivitas Program Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal tahun 2021”

Gambar 1.1

Jumlah Pendaftar Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal Tahun 2019-2022



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui bahwa jumlah pendaftar Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal tahun 2019 sebanyak 401 orang. Kemudian, menurun pada 2020 menjadi 398 orang. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 414 orang. Jumlah pendaftar pada 2022 semakin meningkat dan paling banyak yaitu, 553 orang. Selanjutnya, calon peserta Program WP Kabupaten Tegal yang sudah mendaftar akan diseleksi menjadi 100 besar. Peningkatan jumlah pendaftar Program WP Kabupaten Tegal dapat diindikasikan bahwa tiap tahunnya minat berwirausaha di kalangan pemuda Kabupaten Tegal semakin meningkat dengan adanya program tersebut.

Tabel 1.1
Jumlah Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal Tahun 2019-2022

Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal 2019	100	100	100%
Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal 2020	100	100	100%
Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal 2021	100	100	100%
Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal 2022	100	100	100%

Sumber : LKJiP Disporapar Kabupaten Tegal Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal yang dihasilkan oleh inovasi Program WP hingga tahun 2022 adalah sebanyak 400 orang. Pelaksanaan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal berhasil mencapai target tiap tahunnya sejak 2019 sampai 2022. Dengan jumlah tersebut Dinas Porapar Kabupaten Tegal berhasil mencapai target kinerja tahun 2022 pada indikator kinerja wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis yang ditargetkan sebanyak 400 orang.

Inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal masuk pada 20 besar finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Jawa Tengah Tahun 2020 dan inovasi Program Wirausaha Pemuda (WP) Kabupaten Tegal menjadi percontohan BAPPENAS untuk menyusun strategi nasional yang akan ditetapkan dalam waktu dekat (Jateng.tribunnews.com, 2020). Pada tahun 2022, BAPPENAS meluncurkan Dokumen Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda dengan mengadopsi Program WP Kabupaten Tegal. Inovasi Program WP Kab. Tegal menjadi percontohan bagi pemerintah pusat dalam membuat kebijakan tentang kewirausahaan pemuda. Selain itu, inovasi Program WP Kab. Tegal juga juga menjadi percontohan untuk daerah lain terkait kewirausahaan pemuda, seperti Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Purbalingga, Kota Magelang, dan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pelaksanaan inovasi Program WP Kabupaten Tegal telah berhasil dalam menumbuhkan wirausaha muda di Kabupaten Tegal, maka pertanyaan penelitian ini adalah mengapa inovasi Program WP Kabupaten Tegal berhasil dalam menumbuhkan wirausaha muda di

Kabupaten Tegal? Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Porapar Kabupaten Tegal dapat berhasil dan faktor pendukung keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

1.2.Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal dapat berhasil?
- b. Apa saja faktor pendukung keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis keberhasilan Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat, seperti inovasi Program Wirausaha Pemuda (WP) Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menambah pengetahuan mengenai inovasi Program Wirausaha Pemuda (WP) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi berupa masukan dan saran kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal untuk membantu perbaikan dan peningkatan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini harapannya dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi masyarakat terutama pemuda mengenai Program Wirausaha Pemuda (WP) Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk menyampaikan informasi bahwa penelitian ini berbeda penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam bentuk artikel yang temuat di jurnal, antara lain:

Penelitian pertama dilakukan oleh Indrayanti (2021) berjudul “Implementasi dan Efektivitas Program Wirausaha Pemuda di Kabupaten Tegal” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal terdiri dari tahap penumbuhan dan tahap pengembangan. Implementasi program tersebut terdiri dari tahap penumbuhan dan tahap pengembangan sudah cukup baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menumbuhkan pengusaha baru di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, efektivitas Program Wirausaha Pemuda sudah cukup efektif dalam menumbuhkembangkan wirausaha pemuda di Kab. Tegal dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, dan ketepatan sasaran.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fauziah et al. (2022) berjudul “Efektivitas Program Wirausaha Pemuda dalam Upaya Penurunan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal” yang ditulis tahun 2022 menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Program Wirausaha Pemuda cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada masa Covid-19 di Kabupaten Tegal berdasarkan pemahaman program oleh peserta, ketepatan

sasaran program, dan perubahan nyata. Ketepatan waktu kurang efektif karena adanya pandemi Covid-19 dan tercapai tujuan belum efektif sepenuhnya belum maksimal mengurangi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lutfi et al. (2020) berjudul “Implementasi Program Wirausaha Muda Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Program Wirausaha Muda Kab. Sumenep belum terlaksana secara maksimal. Hal ini karena terdapat banyak hambatan, seperti jadwal pelatihan tidak fleksibel, alur kegiatan tidak dijelaskan; kurangnya pemahaman nilai-nilai kewirausahaan pada alumni peserta program, dan hasil program ini belum dapat mengurangi masalah pengangguran di Kabupaten Sumenep secara signifikan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hidayati & Agustina (2023) berjudul “Program Seribu Pemuda Berwirausaha di Kabupaten Batang” menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis bentuk Program Seribu Pemuda Berwirausaha. Hasil penelitiannya adalah bentuk Program Seribu Pemuda Berwirausaha dimulai dari memilih beberapa UKM dengan kriteria tertentu untuk masuk dalam pameran. Strategi dari program ini terdiri dari bidang pemasaran, yaitu dengan memfasilitasi pameran bagi UKM dan kemitraan dengan pusat perbelanjaan daerah; dan bidang sumber daya manusia adalah memberikan pelatihan pengemasan, pembukuan keuangan, dan pendampingan usaha. Namun, pada program ini belum dilakukan evaluasi lanjutan terhadap wirausahawan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Prastio et al. (2023) berjudul “Memantik Wirausaha Muda di Kota Industri (Studi Peran Pemerintah Daerah melalui Program Wirausaha Muda Pemula di Kabupaten Bekasi) dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah peran Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi pada Program Wirausaha Muda Pemula belum optimal. Hal ini karena pada peran sebagai regulator belum mampu membuat iklim yang kondusif dilihat dari rendahnya minat masyarakat terhadap program. Pada peran sebagai fasilitator belum memberikan akses permodalan dan pendampingan. Pada peran sebagai katalisator masih lemah dalam hal pemberdayaan, tidak ada penghargaan bagi peserta dan dampak keberlanjutan program yang belum jelas.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Virianita et al. (2022) berjudul “Keberhasilan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru (WUB)” menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif dan bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan pelatihan tersebut menggunakan model CIPP (konteks, input, proses, dan produk). Hasil penelitiannya adalah Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Muda Baru di Kabupaten Bogor dapat berhasil karena pada dimensi *Context* didukung oleh kebijakan hukum, tujuan program sesuai dengan kebutuhan, program memiliki manfaat positif, dan ketepatan sasaran. Pada dimensi *Input* didukung oleh kondisi SDM dan kesesuaian sarana prasarana dengan tujuan program. Pada dimensi *process* masih terdapat kendala pada kurangnya sarana prasarana, media dan metode pembelajaran yang kurang sesuai.

Pada dimensi *product* sikap peserta pelatihan belum berhasil diubah dan tidak adanya dana insentif bagi peserta untuk mengembangkan usahanya.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Lasaksi (2023) berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PMI dan Papua dalam Menggalakkan Kewirausahaan Pemuda” dengan metode penelitian kuantitatif dan berfokus pada dampaknya terhadap peningkatan kewirausahaan pemuda. Hasil penelitian adalah Program Papua Muda Inspiratif (PMI) telah berhasil secara signifikan dalam mempromosikan kewirausahaan pemuda di Papua. Hal ini karena struktur program dengan durasi rata-rata 9 bulan terencana dengan baik sehingga minat dan komitmen partisipasi para pemuda di Papua tinggi, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kewirausahaan peserta, kualitas bimbingan kewirausahaan yang baik, aksesibilitas terhadap dukungan keuangan dan informasi cukup baik, dan tingginya kepuasan peserta terhadap program tersebut.

Selain pemaparan penelitian terdahulu terkait topik wirausaha pemuda yang relevan, peneliti juga memaparkan penelitian terdahulu terkait dengan inovasi sektor publik yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Suranto et al. (2023) yang berjudul “*Determinants of Service Innovation Governance of Gampil in Bantul Regency*” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Inovasi GAMPIL Gerakan Melayani Perizinan Langsung) merupakan inovasi dari Dinas PMPTSP Kabupaten Bantul mengenai pembuatan NIB untuk pelaku UMKM. Hasil penelitiannya adalah tata kelola inovasi layanan GAMPIL secara kelembagaan

sudah baik karena adanya regulasi yang benar, inovasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh pelaksana, sebagian besar inovasi didukung oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku. Secara aktor kebijakan, aktor internal sebagai *leading sector* inovasi adalah DPMPTSP Kabupaten Bantul, aktor eksternal sebagai pendukung implelementasi inovasi adalah Dinas Koperasi UKM dan Industri, Kementerian Agama, kecamatan dan kelurahan. Pada aspek masyarakat, pengetahuan tentang program ini masih kurang, sebagian besar belum mengenal aplikasi berbasis TI, dan partisipasi masyarakat pada inovasi cukup baik. Faktor penentu tata kelola inovasi ini adalah aspek organisasi seperti gaya kepemimpinan, aspek individu bukan struktural, dan model *top down*.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Hapzah et al. (2020) yang berjudul “Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik: Dimensi Kelembagaan, Aktor Kebijakan dan Masyarakat” menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah inovasi Program 6 in 1 di Dispendukcapil Kota Surabaya telah berjalan cukup baik dilihat dari tata kelola inovasi. Pada dimensi kelembagaan, sistem regulasi yang digunakan sudah baik, adanya ketepatan pelaksanaan inovasi sesuai dengan aturan yang ada, sikap melayani sudah baik. Pada dimensi aktor kebijakan, aktor internal dan aktor eksternal sudah baik karena tercipta *teamwork* yang baik. Pada dimensi masyarakat, sudah ada partisipasi masyarakat, tetapi pengetahuan masyarakat tentang inovasi ini masih kurang.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Eprilianto et al. (2023) yang berjudul “*Improving the Quality of Public Service through Bojonegoro Regency Public*

Service Mall Innovation” menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil penelitiannya adalah pemerintah keberhasilan inovasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro karena pada aspek kepemimpinan bahwa Kepala Dinas PMPTSP menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan transformatif, pada aspek manajemen telah mengembangkan layanan berbasis teknologi, pada aspek manajemen risiko telah melakukan pencegahan masalah dengan membenahi jaringan internet, pada aspek SDM telah berpengalaman dan kompeten, dan pada aspek teknologi bahwa layanan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi.

Pada penelitian terdahulu terkait Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal memiliki fokus pada analisis implementasi dan efektivitas program. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal dilihat sebagai inovasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal yang ditujukan untuk pemuda di Kabupaten Tegal. Pada penelitian terdahulu lainnya, keberhasilan inovasi dapat dilihat dari tata kelola inovasi. Penelitian tentang tata kelola inovasi belum banyak dilakukan. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian tentang keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal dilihat dari tata kelola inovasi dan faktor pendukung keberhasilan inovasi.

1.5.2. Administrasi Publik

Adminitrasi menurut Thoha (1983), asalnya dari kata “*ad*” yang bermakna intensif dan kata “*ministrare*” yang bermakna melayani atau memenuhi dalam bahasa latin sehingga “*administrare*” artinya melayani secara intensif (dalam Astuti et al., 2020: 17-18). Menurut A. Dunsire, administrasi adalah aktivitas, arahan, pelaksanaan, pemerintahan, kegiatan melakukan analisis, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, pekerjaan memproduksi jasa dan barang publik secara individu maupun kelompok, dan tempat bidang kerja teoritik dan akademik (dalam Keban, 2014: 2). Publik dapat diartikan sebagai masyarakat luas dan juga menunjuk lembaga pemerintah sebagai orang yang bertugas untuk kepentingan publik (Keban, 2014:4).

Mengatasi permasalahan masyarakat dengan membenahi dan menyempurnakan bidang keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi, sumber adalah tujuan dari administrasi publik dilihat sebagai disiplin ilmu (Keban, 2014: 3). Dimock, Dimock, & Fox (dalam Keban, 2014: 5) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah aktivitas memproduksi jasa atau barang yang direncanakan guna memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Nigro dan Nigro (dalam Keban, 2014: 5) mengatakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama yang dikerjakan bersama-sama dalam organisasi publik pada tiga cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang menjadi peranan penting dalam formulasi suatu kebijakan publik. Keban (2014) berpendapat bahwa administrasi publik adalah seperti apa tugas pemerintah sebagai regulator yang selalu aktif dalam mengambil langkah yang penting dan baik bagi publik karena

publik diibaratkan sebagai pihak yang harus tunduk dan diatur oleh pemerintah. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai pembentukan dan implementasi kebijakan yang dikerjakan oleh birokrasi dalam tingkatan besar untuk kepentingan umum (Keban, 2014: 5).

Batasan administrasi publik menurut Nicholas Henry, yaitu campuran antara teori dan praktik yang kompleks untuk memperkenalkan pandangan tentang peran pemerintah dalam interaksinya dengan masyarakat umum dan membuat kebijakan publik agar lebih responsif pada kebutuhan sosial (dalam Keban, 2014: 6). Henry (1995) menyampaikan ruang lingkup dari administrasi publik (dalam Keban, 2014: 9), yaitu :

- 1) Lembaga publik, berkaitan dengan perilaku birokrasi dan gaya-gaya lembaga publik.
- 2) Manajemen publik, berkaitan dengan ilmu dan sistem manajemen, evaluasi program, anggaran publik, evaluasi produktivitas, manajemen SDM.
- 3) Pelaksanaan, berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik, administrasi antar pemerintahan, privatisasi, etika birokrasi, dan kebijakan publik.

Peran administrasi menentukan stabilitas, kesejahteraan, dan ketahanan suatu negara (Keban, 2014: 17). Administrasi publik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atau *public interest*. Pencapaian tujuan pada administrasi publik dinilai dari aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi aspek-aspek tersebut tidak harus mencapai titik optimal karena administrasi publik lebih *non profit oriented*. Menurut Chandler dan Plano (1988), hal tersebut juga karena oleh

nilai keadilan dan tanggung jawab terhadap publik yang harus dipertimbangkan oleh administrasi publik (dalam Keban, 2014: 21).

Berdasarkan penjelasan makna administrasi publik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama antara orang-orang yang berada di organisasi publik dalam rangka memenuhi kepentingan publik dan mencapai tujuan negara melalui kebijakan publik yang ditetapkan. Inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal termasuk dalam kajian administrasi publik karena inovasi program tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi publik yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik di Kabupaten Tegal.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menurut Kuhn (dalam Keban, 2014: 31) adalah cara pandang, prinsip dasar, *values*, upaya untuk mengatasi permasalahan yang dicontoh oleh masyarakat ilmiah pada masa tertentu. Pergeseran paradigma terjadi pada perkembangan ilmu administrasi publik, menurut Nicolas Henry ada 6 pergeseran paradigma (dalam Astuti et al., 2020: 22-25).

Paradigma pertama (1900-1926) atau dipanggil dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Goodnow mengemukakan bahwa politik perlu memfokuskan perhatian pada kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat, sedangkan administrasi memusatkan perhatian pada pelaksanaan dari kebijakan itu. Pemisahan pada administrasi dan politik adalah pembelahan antara legislatif yang fungsinya menyalurkan keinginan rakyat, dengan eksekutif yang fungsinya melaksanakan keinginan tersebut. Sementara fungsi yudikatif dalam hal ini adalah

mendukung badan legislatif dalam merumuskan dan menetapkan tujuan kebijakan. Pada paradigma pertama ini berimplikasi bahwa administrasi itu patut dilihat seperti hal yang bebas nilai dengan tujuan untuk meraih nilai ekonomi dan nilai efisiensi dari birokrasi pemerintah.

Paradigma kedua (1927-1937) disebut dengan paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik dikenalkan oleh Willoughby, Urwick & Gullick. Prinsip-prinsip administrasi yang dimaksud disebut dengan POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Prinsip-prinsip tersebut menurut Willoughby, Gullick & Urwick bersifat universal atau dapat diterapkan di mana saja. Pada paradigma ini, *locus* administrasi publik tidak dibuka secara jelas sebab prinsip-prinsip itu dapat berlaku di mana saja, termasuk berlaku di organisasi pemerintahan. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi ini lebih menekankan pada fokus dibanding lokusnya.

Paradigma ketiga (1950-1970) disebut dengan paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Pemisahan politik dan administrasi sebagai sesuatu yang tidak realistis ditanyakan oleh Morstein-Marx. Terdapat pertentangan antara administrasi bebas nilai dengan politik sarat nilai. Pada prakteknya, yang berlaku adalah pendapat kedua maka teori administrasi publik sebenarnya teori politik juga seperti yang dikatakan oleh John Gaus. Hal tersebut mengakibatkan munculnya paradigma baru, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik. Birokrasi pemerintahan menjadi lokus paradigam ini, sementara fokusnya menjadi tidak jelas karena prinsip-prinsip administrasi publik memiliki banyak kekurangan.

Dalam dunia administrasi publik saat itu didominasi oleh ilmu politik sehingga administrasi publik mengalami krisis identitas.

Paradigma keempat (1956-1970), yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi. Adanya pengembangan secara mendalam dan ilmiah tentang prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya pernah terkenal. Analisis manajemen, perilaku organisasi, pemanfaatan teknologi modern seperti analisis sistem, metode kuantitatif, riset operasi, dan lainnya menjadi fokus dari paradigma ini. Paradigma ini berkembang menjadi dua arah, yaitu berpusat pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berpusat pada kebijakan publik. Asumsi dari semua fokus yang dikembangkan di sini adalah dapat digunakan dalam dunia administrasi publik, bukan hanya dalam dunia bisnis sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma kelima (1970-sekarang) adalah paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma kelima ini fokusnya pada teori manajemen, teori organisasi, dan kebijakan publik. Sementara lokusnya pada permasalahan dan kepentingan masyarakat. Pada paradigma ini telah mempunyai fokus dan lokus yang jelas.

Paradigma keenam (1990-sekarang) adalah paradigma *Governance*. *Governance* merupakan kebijakan sistem nilai, dan kelembagaan di mana hal-hal yang berkaitan dengan politik, sosial, dan ekonomi dikelola lewat interaksi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Paradigma ini mengutamakan masyarakat dapat menyampaikan kepentingannya dan menjalankan hak serta kewajiban. Harapannya pemerintah dapat menjalankan peran untuk membuat

lingkungan hukum dan politik yang kondusif, sementara peran pihak swasta adalah membuat lapangan pekerjaan, kemudian masyarakat madani menyelenggarakan interaksi sosial dan politik yang memadai. Menurut Cheema (dalam Keban, 2014) inti paradigma ini adalah memperkokoh interaksi antara ketiga aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam hal memperkenalkan pengembangan yang tertuju pada masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, yaitu paradigma *Governance*. Paradigma ini menganalisis pelayanan publik yang dilakukan dengan melibatkan interaksi antara ketiga aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. Tindak lanjut dari *governance* itu melahirkan berbagai macam gagasan atau ide menjadi kepastian. Dalam hal tersebut merupakan tempat bagi pemikiran inovatif. Pemerintah Kabupaten Tegal membuat suatu inovasi, yaitu Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal. Dalam melaksanakan program tersebut Pemkab Tegal melibatkan pihak swasta dan masyarakat untuk memenuhi hak dan kepentingan masyarakat terutama pemuda dalam menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berwirausaha.

1.5.4. Manajemen Publik

Robbins dan Coulter (1999) mengungkapkan bahwa manajemen didefinisikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pekerjaan agar selesai dengan efektif dan efisien lewat orang lain (dalam Taufiqurokhman & Satispi, 2018: 7). Manajemen menurut Shafritz & Russel (1997: 20) berkaitan dengan individu yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan suatu organisasi dengan memakai mesin dan sumber daya manusia untuk mencapai

tujuan organisasi (dalam Keban, 2014: 92). Definisi manajemen tersebut tidak hanya mengenai proses meraih tujuan, tetapi berkenaan juga dengan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam proses tersebut (Keban, 2014: 92).

Robbins dan Coulter (1999) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen (dalam Taufiqurokhman & Satispi, 2018: 8-9), yaitu:

- 1) Perencanaan, meliputi pengartian tujuan, penetapan strategi, pengembangan konsep untuk mengkoordinasi aktivitas.
- 2) Pengorganisasian, meliputi penentuan tugas, pembagian tugas, dan keputusan harus dibuat pada tingkat mana.
- 3) Kepemimpinan, meliputi kegiatan memberikan motivasi kepada bawahan, pengerahan, pemilihan saluran komunikasi yang paling efektif, dan mengatasi konflik.
- 4) Pemantauan atau pengendalian, yaitu pengamatan aktivitas guna memastikan semua terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Overman mengemukakan bahwa manajemen publik, yaitu suatu kajian bidang studi dari komponen-komponen umum organisasi dan merupakan kombinasi dari fungsi manajemen seperti *planing*, *organizing*, *controlling* di sisi satu, dengan SDM, fisik, keuangan, politik, dan informasi di sisi yang lain (dalam Keban, 2014: 92). Dua bidang tersebut dapat dibedakan dengan jelas maka dapat dikemukakan bahwa manajemen publik merupakan proses dalam menjalankan sumber daya manusia dan non manusia berdasarkan pada perintah kebijakan publik. Manajemen sektor publik bersifat hirarkis, jangkauan wilayah yang luas,

tuntutan akuntabilitas publik, tuntutan profesionalitas, dan sistem *reward* yang terbatas (Keban, 2014: 106)..

Lynn (1996) memikirkan tiga perihal yang mungkin tentang manajemen publik, yaitu sebagai ilmu, profesi, dan seni (dalam Wijaya & Danar, 2014: 2). Sebagai seni, manajemen publik adalah aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para pelaksana yang tidak dapat ditelaah dengan menggunakan hitungan karena aktivitas tersebut memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung pada kondisi dan situasi di mana beroperasi. Sebagai ilmu, manajemen publik artinya manajemen publik membutuhkan sebuah analisis sistematis dengan menggunakan interpretasi dan eksplanasi. Sementara sebagai profesi, manajemen publik merujuk pada sekelompok individu yang mengabdikan dirinya kepada ilmu ini. Manajemen di sektor publik bersifat hirarkis, jangkauan wilayah yang luas, adanya tuntutan akuntabilitas publik dan profesionalitas, serta sistem *reward* yang terbatas (Keban, 2014: 106).

Wilson meletakkan empat asas dasar bagi kajian administrasi publik yang memengaruhi manajemen publik hingga saat ini (dalam Keban, 2014: 100), antara lain:

- 1) Pemerintah sebagai pengaturan utama organisasi.
- 2) Fokus utamanya adalah peran eksekutif.
- 3) Kunci pengembangan kompetensi administrasi adalah pencarian teknik dan prinsip-prinsip manajemen yang lebih efektif.
- 4) Metode kajian pengembangan bidang administrasi publik adalah metode perbandingan.

Kesimpulan berdasarkan penjelasan manajemen publik tersebut adalah bahwa manajemen publik merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi guna meraih tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan. Inovasi Program Wirausaha Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal termasuk dalam manajemen publik karena diperlukan pola pikir dan pengetahuan dari instansi terkait agar dapat mencapai tujuan organisasi. Kemudian, bagaimana Pemerintah Kabupaten Tegal membuat dan menjalankan inovasi tersebut agar terlaksana sesuai dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan serta agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.5. Inovasi

Inovasi menurut Rogers (2003) adalah suatu gagasan, objek atau praktik yang dianggap baru oleh orang atau unit adopsi lainnya (dalam Thahir, 2019: 180). Inovasi dalam pandangan Suryani (2008: 304), yaitu ide, cara-cara atau objek yang baru menurut persepsi seseorang (dalam Thahir, 2019: 180). Afuah (1998) menyatakan bahwa inovasi merupakan ilmu baru yang disatukan dalam proses, produk, dan layanan (dalam Kogabayev & Maziliauskas, 2017: 61). Inovasi menurut Nicholas (1983) merupakan ide atau praktik sesuatu yang baru dari seseorang atau sekelompok orang untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan (dalam Syafaruddin et al., 2012: 24).

Pedoman Oslo (OECD/ Eurostat, 2018) mengemukakan bahwa inovasi adalah produk/proses yang baru atau lebih baik yang berbeda secara signifikan dari proses atau produk unit sebelumnya dan yang telah ada bagi pengguna

potensial (produk) atau digunakan oleh unit (dalam Arundel et al., 2019: 792). Albury (2003) mengatakan bahwa inovasi berkaitan kuat dengan gagasan-gagasan baru yang memiliki manfaat (dalam Suwarno, 2008: 10). Jika tidak ada nilai kemanfaatan dari adanya inovasi itu maka kebaruan dalam inovasi tidak akan berarti apa-apa. Dari beberapa pendapat di atas maka inovasi merupakan suatu ide atau praktik yang baru dari individu atau kelompok dan dianggap baru menurut individu lain serta memiliki manfaat.

Inovasi biasanya berkaitan dengan lingkungan yang dinamis dan berkembang. Inovasi juga identik dikerjakan oleh sektor swasta ketika memberikan pelayanan kepada konsumennya agar tetap bertahan dalam rivalitas pasar. Keberhasilan inovasi yang dilakukan sektor swasta diharapkan dapat dilakukan oleh sektor publik dalam mengatasi suatu masalah publik dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik. Nilai yang dimiliki oleh inovasi di sektor publik berbeda dari nilai yang ada di sektor privat serta dapat lebih kompleks dan lebih sulit untuk diukur, mencakup hasil yang dapat diukur dengan mudah (berkurangnya kekerasan, kemiskinan, kekerasan, dan sebagainya) dan beberapa hasil yang '*softer*' seperti kualitas pelayanan atau kepercayaan antara penyedia layanan dan pengguna (Mulgan & Albury, 2003: 6).

Inovasi di sektor publik atau pemerintahan menurut Albury (2005) adalah kreasi dan pelaksanaan dari pelayanan, produk, dan proses, serta metode pengiriman yang baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas hasil, atau efektivitas secara signifikan (dalam Kattel et al., 2013: 6). Pada prosesnya, inovasi pada pemerintahan dapat muncul karena berbagai faktor, seperti adanya stimulasi

dari pihak luar, seperti suatu uji yang dilakukan perguruan tinggi yang berhasil; adanya peraturan perundang-undangan atau perintah dari pimpinan, misalnya pemerintah daerah berinovasi berdasarkan keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, dan lain-lain; pengalaman pada implementasi kebijakan, misalnya inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat (Thahir, 2019: 182).

Posisi pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat, yang lebih dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah sehingga diharapkan inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat lebih responsif dan solutif terhadap masalah yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Dalam praktiknya, asal inovasi tidak hanya dari pemerintah sendiri, tetapi dapat muncul juga dari luar seperti perguruan tinggi, swasta, atau unsur sosial. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi dapat berasal dari inisiatif kepala daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Pada peraturan pemerintah tentang inovasi daerah, bentuk inovasi daerah terdiri dari:

- a) Inovasi tata kelola pemerintah daerah, yaitu inovasi yang ada pada pelaksanaan manajemen pemerintah daerah, mencakup tata laksana internal pada pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- b) Inovasi pelayanan publik, yaitu inovasi yang ada pada penyediaan pelayanan kepada publik mencakup proses pemberian pelayanan jasa atau barang publik, inovasi jenis dan bentuk jasa atau barang.

- c) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

PP No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan mengenai kriteria inovasi daerah, yaitu:

- a) Sebagian atau seluruh komponen dari inovasi mengandung pembaharuan.
- b) Memberi manfaat bagi masyarakat atau daerah.
- c) Tidak ada pembatasan atau pembebanan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e) Dapat diduplikasi.

1.5.5.1.Tata Kelola Inovasi

Tata kelola atau governansi merupakan kata untuk mengungkapkan penilaian upaya mengelola berbagai sektor pemerintahan, yang lebih spesifik terkait dengan tata kelola dalam inovasi dan administrasi publik (Andhika, 2018 : 207). Governansi inovasi berkaitan dengan seperti apa inovasi dikelola dengan cara yang inovatif serta seperti apa organisasi berjalan dari sebuah ide menjadi layanan maupun produk jadi. Alberti & Bertucci, 2007 (dalam Andhika, 2018: 216) mengungkapkan bahwa keberhasilan inovasi dilihat dari tata kelola inovasi. Menurut *United Nations* (2015) terkait *Innovation Public Service Delivery: Learning from Best Practice*, tata kelola adalah bagian sentra dalam inovasi penyediaan layanan publik (dalam Andhika, 2018: 209). Yang paling utama dalam pengadaan pelayanan publik yang inovatif memerlukan penguatan tata kelola dan kapasitas sektor publik adalah terkait aktor kebijakan, analisis

kelembagaan, dan masyarakat dalam sistem tata kelola. Berikut penjelasan terkait masyarakat, aktor kebijakan, dan kelembagaan dalam sistem tata kelola menurut Andhika (2018), yaitu:

1. Kelembagaan

Lembaga pemerintah merupakan penghubung antar pemerintah dengan masyarakat. Lembaga pemerintah dalam hal pelayanan publik adalah organisasi yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Kelembagaan menurut Scott (dalam Ghassani et al., 2023: 52) adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur regulatif, normati, dan kultural-kognitif yang berjalan bersama dengan aktivitas dan sumber daya terkait akan memberikan manfaat untuk kehidupan sosial. Menurut Scott (2004), tiga pilar utama analisis kelembagaan (dalam Andhika, 2018: 210-211), yaitu:

a) Regulative systems

Sistem regulasi yang baik dapat meningkatkan dan memantau kinerja lembaga secara berkepanjangan dengan berbagai kebijakan yang dijadikan sebagai landasan hukum.

b) Normative systems

Nilai dan ketaatan penyelenggara pelayanan publik dengan berbagai ketetapan dan kebijakan yang mampu memudahkan mencapai tujuan yang telah direncanakan.

c) Cultural-cognitive system

Merrill (dalam Andhika, 2018: 211) mengartikan hal ini sebagai sikap atau *attitudes*, kepercayaan, pengalaman, kebiasaan atau *habbits*, dan nilai atau

values pada individu dalam organisasi pemerintah dan pemangku kepentingan.

2. Aktor kebijakan

Keberhasilan inovasi tidak sekadar didukung oleh kebijakan, tetapi juga harus didukung oleh kolaborasi, sumber daya manusia, berbagai pihak lintas batas, dan masyarakat sipil yang dapat membuat pergerakan proses politik lebih kondusif. Kemudahan menciptakan beragam kebijakan dan persetujuan pengesahan yang mendukung inovasi karena adanya proses politik yang baik. Menurut Madani (dalam Hapzah et al., 2020: 156) aktor kebijakan meliputi aktor eksternal meliputi aktor individu maupun kelompok yang ikut serta dalam program tersebut dan aktor internal yang menjadi *leading sector* atau bertanggung jawab penuh atas program tersebut.

3. Masyarakat

Menurut Michels (dalam Andhika, 2018: 213) partisipasi masyarakat meningkatkan dan memperdalam pengambilan keputusan kebijakan. Menurut Thapa et al. (dalam Andhika, 2018: 213) tantangan utama partisipasi masyarakat dalam inovasi sektor publik adalah pada kemampuan (keahlian/pengetahuan) masyarakat dalam inovasi. Sebelum inovasi itu berjalan, berbagai kemungkinan dari partisipasi masyarakat dapat direncanakan oleh penyedia layanan, apakah menjadikan masyarakat pada pengembangan inovasi sebagai mitra atau hanya sebagai objek.

1.5.5.2.Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi

Inovasi dapat berjalan lancar dan berhasil karena didukung oleh beberapa faktor. Menurut Cook, Mattews & Irwin (2009) faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi pada suatu organisasi (dalam Eprilianto et al., 2023) , yaitu:

1. Kepemimpinan

Menurut Cook, Mattews & Irwin, keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh tanggung jawab seorang pemimpin (dalam Eprilianto et al., 2023: 189). Pemimpin mempunyai peran untuk mendorong, memberi motivasi, dan mengarahkan untuk menciptakan kreativitas guna memperoleh tujuan organisasi. Pemimpin harus dapat menumbuhkan kepercayaan anggota, memperkenalkan proses perbaikan, memberdayakan anggota untuk berinisiatif, dan menjalin kerjasama antar unit. Kepemimpinan fungsi utamanya adalah mampu menciptakan kebijakan dan prosedur guna memberikan fasilitasi pada inovasi serta mendorong kepemimpinan dan inovasi pada semua jenjang dalam suatu organisasi.

2. Manajemen

Di suatu organisasi, sangat penting menetapkan visi misi, strategi dan nilai-nilai organisasi untuk membuat budaya dan identitas organisasi. Organisasi harus mempunyai iklim dan budaya yang mendorong peningkatan inovasi dan dapat terus menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Menurut Cook, Matthew & Irwin (2009), cara membentuk organisasi yang inovatif adalah harus memiliki pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan strategi pelaksanaan program, serta teknologi

informasi (dalam Anggadwita, 2013: 309). Proses untuk melakukan hal ini seperti pembentukan kelompok kerja, komite pengarah dan jaringan pihak internal dan eksternal.

3. Manajemen Risiko

Yang menjadi hal mendasar dari proses inovasi adalah manajemen risiko. Risiko diukur dengan perpaduan dampak dan kemungkinan, risiko ditandai dengan ketidakpastian. Identifikasi manajemen risiko, kebijakan dan prosedur yang perlu pertimbangan dan informasi yang ada adalah hal-hal yang diperlukan untuk memfasilitasi suatu inovasi. Lebih baik menghadapi risiko daripada menghindari risiko karena akan menghambat inovasi. Penerapan manajemen risiko merupakan sesuatu yang penting saat proses pengambilan keputusan dan harus sesuai dengan tujuan. Maksudnya, tingkat pengawasannya dan spesifik kegiatan pencegahan harus sepadan dengan kompleksitas, nilai dan sensitivitas yang terkait dengan siklus inovasi tertentu (Cook, Mattews & Irwin dalam Anggadwita, 2013: 309).

4. Sumber daya manusia

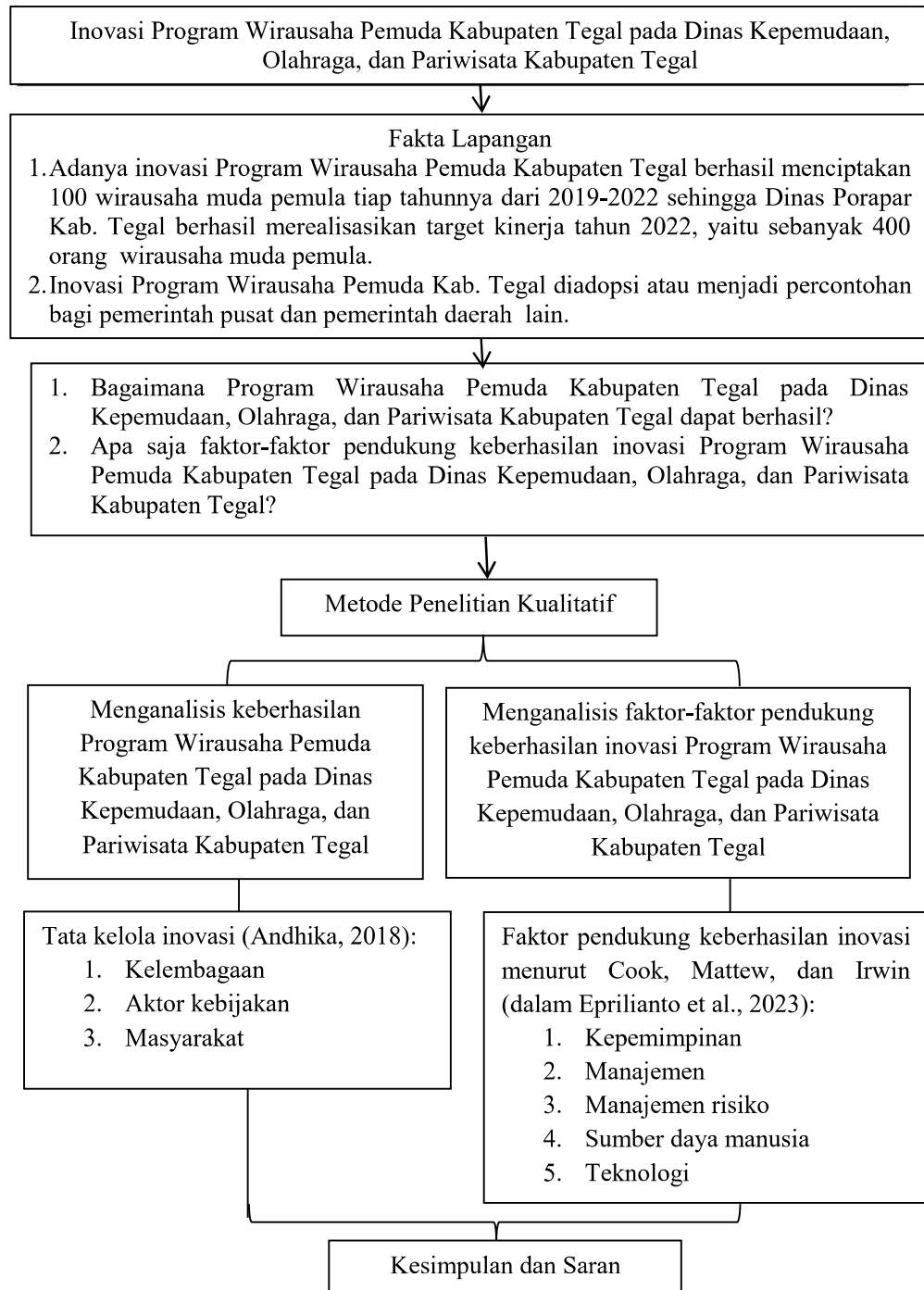
Dalam melakukan inovasi, sumber daya manusia yang memiliki kualitas bagus dan berkompeten di bidangnya serta dorongan dan komitmen dari seluruh anggota organisasi diperlukan untuk mampu menghadapi persaingan pasar. Kunci strategi SDM adalah proses rekrutmen, retensi, pelatihan, dan pengembangan staf (Cook, Mattews & Irwin dalam Eprilianto et al., 2023: 190). Pelatihan dan pengembangan staf adalah suatu peluang untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam suatu organisasi. Prioritas perusahaan

adalah menjadikan kegiatan mengidentifikasi kemampuan karyawan sebagai sumber daya terbaik sebagai suatu kebutuhan.

5. Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat memudahkan manajemen perusahaan ketika proses menyebarkan inovasi kepada masyarakat (Cook, Matthews & Irwin dalam Eprilianto et al., 2023: 190). Meningkatkan pengembangan inovasi produk dan jasa dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Pengguna layanan mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi yang diinginkan karena adanya teknologi sebagai alat antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



1.6.Operasionalisasi Konsep

Inovasi merupakan suatu ide atau praktik yang baru dari individu atau kelompok dan dianggap baru menurut individu lain serta memiliki manfaat. Dalam penelitian ini, inovasi yang akan diteliti adalah keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Inovasi Program Wirausaha Pemuda adalah suatu ide atau praktik yang baru dari individu atau kelompok dan dianggap baru menurut individu lain serta bermanfaat dalam upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal.

1.6.1. Keberhasilan Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal

Keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal akan ditinjau dari tata kelola inovasi. Tata kelola inovasi merupakan cara sebuah organisasi bagaimana mengelola suatu inovasi. Tata kelola inovasi pada inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal adalah pengelolaan Dinas Porapar Kabupaten Tegal terhadap inovasi Program Wirausaha Pemuda sehingga mencapai keberhasilan. Keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal akan dilihat berdasarkan tata kelola inovasi yang terdiri dari:

1.6.1.1.Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan, norma dan nilai yang berjalan bersama dengan aktivitas dan sumber daya terkait akan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Kelembagaan dalam tata kelola inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal dapat dilihat dari :

a. Regulative system

Sistem regulasi adalah regulasi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sistem regulasi dilihat dari regulasi yang terdapat dalam pelaksanaan inovasi Program Wirausaha Pemuda.

b. Normative system :

Sistem norma adalah nilai dan kepatuhan pihak penyelenggara inovasi terhadap keputusan dan kebijakan yang ada. Sistem norma ini dilihat dari kepatuhan Dinas Porapar Kab. Tegal dan pihak-pihak yang terlibat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan inovasi Program WP Kab Tegal.

c. Cultural cognitive system

Sistem kultural kognitif adalah sikap, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi. Tegal. Sistem budaya dapat dilihat dari sikap pegawai Dinas Porapar Kab. Tegal dan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan inovasi Program WP.

1.6.1.2. Aktor Kebijakan

Aktor kebijakan adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Aktor kebijakan mencakup aktor internal yang menjadi penanggung jawab penuh program dan aktor eksternal yang mendukung pelaksanaan program. Aktor kebijakan dapat dilihat dari siapa aktor-aktor internal dan eksternal yang terlibat dalam inovasi Program WP Kab. Tegal dan peran dari masing-masing aktor tersebut.

1.6.1.3.Masyarakat

Masyarakat dalam tata kelola inovasi, yaitu partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi. Dimensi masyarakat ini dapat dilihat dari partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi Program WP Kab. Tegal.

1.6.2. Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Program WP Kabupaten

Tegal

Faktor pendukung keberhasilan inovasi pada inovasi Program WP Kab. Tegal adalah faktor yang mempengaruhi inovasi agar dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi, yaitu:

1.6.2.1.Kepemimpinan

Pemimpin berperan dalam membuat kebijakan untuk memfasilitasi inovasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengimplementasikan inovasi. Kepemimpinan pada inovasi Program WP Kab. Tegal dapat dilihat dari :

- a) Dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan inovasi Program WP Kab. Tegal
- b) Komitmen dan peran dari kepala Dinas Porapar dalam pelaksanaan inovasi Program WP.

1.6.2.2.Manajemen

Cara mengelola organisasi dalam membangun budaya inovatif harus memiliki pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan strategi implementasi program. Proses untuk melakukan hal itu seperti

pembentukan tim kerja serta jaringan pihak internal dan eksternal. Manajemen pada inovasi Program WP Kab. Tegal dapat dilihat dari :

- a) Adanya pembentukan tim kerja yang terstruktur dengan baik dalam Program WP Kabupaten Tegal.
- b) Alokasi anggaran dalam Program WP Kabupaten Tegal.
- c) Strategi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan Program WP Kabupaten Tegal.

1.6.2.3.Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan inovasi. Manajemen risiko pada inovasi Program WP dapat dilihat dari bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh Dinas Porapar dalam pelaksanaan inovasi Program WP.

1.6.2.4.Sumber daya manusia

Sumber daya manusia berupa kemampuan anggota organisasi yang memiliki kualitas bagus dan bekompeten dibutuhkan untuk keberhasilan inovasi. Cara meningkatkan kapasitas inovasi dalam suatu organisasi melalui pelatihan dan pengembangan staf. Sumber daya manusia pada inovasi Program WP Kab. Tegal dapat dilihat dari :

- a) Adanya SDM yang bekompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- b) Adanya pelatihan bagi tim kerja kolaborasi inovasi Program WP guna mendukung keberhasilan inovasi ini.

1.6.2.5.Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan inovasi dan memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait inovasi tersebut. Teknologi pada inovasi Program WP dapat dilihat dari adanya penggunaan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan inovasi Program WP Kab. Tegal.

1.7.Argumen Penelitian

Program Wirausaha Pemuda (WP) diselenggarakan oleh Dinas Porapar Kabupaten Tegal. Program Wirausaha Pemuda dalam penelitian ini dilihat sebagai inovasi untuk penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pemula di Kabupaten Tegal. Dengan adanya program tersebut akan menciptakan wirausahawan muda baru yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal dapat berkurang dan mendorong keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan adanya inovasi Program WP Kab. Tegal telah berhasil merealisasikan target kinerja 2022, yaitu menciptakan 400 orang wirausaha muda pemula. Artinya inovasi Program WP berhasil menciptakan 100 orang wirausaha muda pemula setiap tahunnya. Selain itu, inovasi Program WP Kab. Tegal juga menjadi percontohan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kewirausahaan pemuda.

Inovasi Program WP Kab. Tegal berhasil menumbuhkan wirausaha muda pemula dan dapat diterima baik oleh masyarakat dapat disebabkan karena Dinas Porapar Kab. Tegal melakukan tata kelola inovasi yang baik pada inovasi

Program WP Kabupaten Tegal. Faktor pendukung keberhasilan inovasi tersebut dapat disebabkan oleh kepemimpinan, manajemen, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemuda pada Dinas Porapar Kabupaten Tegal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013: 8) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (naturalistik), data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, bentuk data yang dikumpulkan adalah gambar atau kata-kata. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini karena peneliti memerlukan data atau informasi yang berasal dari pendapat dan pandangan dari narasumber yang tidak dapat dideskripsikan dengan bentuk angka.

Tipe penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keberhasilan Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal pada Dinas Porapar Kab. Tegal sebagai inovasi daerah dan faktor pendukung keberhasilan inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi penelitian dilakukan. Situs penelitian ini adalah di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang menjadi penanggung jawab dan pengelola dari inovasi Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki posisi penting dalam penelitian karena data penelitian berada pada subjek penelitian. Penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 85). Pertimbangan yang dilakukan seperti orang yang dianggap paling tahu mengenai hal yang kita inginkan sehingga akan mempermudah peneliti dalam menelusuri objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kepala Dinas Porapar Kabupaten Tegal.
- 2) Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Porapar Kabupaten Tegal.
- 3) Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Porapar Kabupaten Tegal.
- 4) Peserta Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

1.8.4. Jenis Data

Menurut Hardani et al. (2020: 246) jenis data berdasarkan sifat atau bentuk data dibagi menjadi dua jenis, antara lain: data kuantitatif, yaitu data yang memperlihatkan kuantitas dan berbentuk angka absolut sehingga dapat ditentukan besarannya; sedangkan data kualitatif adalah data yang memperlihatkan kualitas, berbentuk kata atau kalimat yang tidak memiliki peringkat. Data kualitatif berupa hal-hal yang termasuk kejadian yang tidak menggambarkan angka, hitungan, atau kuantitas (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 34). Pada penelitian ini menggunakan

jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa kata atau kalimat yang mampu menggambarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

1.8.5. Sumber Data

Data dapat dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian tertentu (Ibrahim dalam Haryoko et al., 2020: 122). Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer menurut Bungin (dalam Haryoko et al., 2020: 122) merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama atau sumber pertama di lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara informan.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Ibrahim (dalam Haryoko et al., 2020: 122) adalah informasi dan realitas yang juga relevan dengan penelitian, tetapi tidak secara langsung atau data pendukung yang relevan dengan data primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, media sosial Program WP, dan berita *online* yang terpercaya terkait inovasi Program WP Kabupaten Tegal.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap yang paling mendasar dalam penelitian karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari penelitian itu sendiri

(Hardani et al., 2020: 120). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah bertanya langsung keadaan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara bertujuan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati orang lain, serta pandangan orang lain tentang apapun yang tidak dapat diketahui melalui pengamatan (Nasution, 1988: 73). Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah kategori wawancara mendalam (Sugiyono, 2013: 233). Dengan wawancara semi terstruktur, beberapa pertanyaan kunci dipersiapkan peneliti untuk memandu proses wawancara, pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dapat dikembangkan selama dalam proses wawancara dilakukan (Haryoko et al., 2020: 167). Sebelum melakukan wawancara, pedoman wawancara dipersiapkan peneliti dulu berupa pertanyaan-pertanyaan kunci terkait inovasi Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal untuk setiap narasumber. Peneliti juga mempersiapkan alat bantu penelitian berupa *recoder* atau ponsel, buku catatan, dan laptop guna memudahkan dan memperlancar proses wawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data melalui dokumen yang berkaitan dengan kejadian atau aktivitas terdahulu yang mungkin terdapat sebuah fakta, informasi, dan data yang diinginkan pada suatu penelitian (Haryoko et al., 2020: 176). Klasifikasi dokumen menurut Bogda dan Biklen (dalam Faisal, 1990: 81-82), yaitu dokumen resmi, dokumen pribadi, dan foto. Penelitian ini mengumpulkan

data dengan dokumentasi berupa beberapa dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dokumen dan foto mengenai Program Wirausaha Pemuda Kab. Tegal yang diselenggarakan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2013: 244) adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang berasal dari hasil wawancara atau lainnya agar mudah dipahami dan temuannya dapat diterangkan kepada orang lain. Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 247-253), yaitu:

a. Reduksi data

Menurut Miles & Huberman, definisi reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada sesuatu yang penting dari catatan-catatan lapangan (dalam Sugiyono, 2013: 247). Reduksi data berlangsung selama pengumpulan data secara terus menerus hingga penulisan laporan akhir penelitian. Dengan mereduksi data dapat memberikan keterangan yang jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya maupun mencarinya.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan aksi. Penyajian data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman biasanya dilakukan dalam bentuk hubungan antar kategori, uraian singkat, bagan, dan sebagainya (dalam

Sugiyono, 2013: 249). Data disajikan agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Tujuan penelitian dan temuan penelitian harus relevan dengan simpulan.

1.8.8. Kualitas Data

Validitas merupakan taraf ketepatan antara data yang terjadi dalam objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid jika antara yang disampaikan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tidak ada perbedaan (Sugiyono, 2013: 267). Salah satu cara untuk mendapatkan tingkat kepercayaan dari hasil-hasil penelitian adalah dengan cara triangulasi. Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data menurut Patton (2006: 99) adalah menguji kebenaran data dengan menggunakan berbagai sumber data dalam suatu penelitian, misalnya melakukan wawancara dengan informan yang berbeda posisi statusnya. Dengan menggunakan triangulasi data, peneliti berkesempatan untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi pada sumber-sumber data.